

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS TIM KEWASPADAAN
DINI DALAM MENANGANI KONFLIK DI KABUPATEN KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Embarina Melviyani Br Ginting
NPP. 30.0089

Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: embarinamelviyani@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Maris Gunawan Rukmana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem statement/Background (GAP): Early awareness at the environmental level is very important to realize environmental security. The realization of environmental security will guarantee regional and regional security, even national security. Early vigilance must start from the environment so that it can immediately detect all possible threats, challenges, obstacles and security disturbances. **Purposes:** This study aims to determine and understand the effectiveness of the early warning team in dealing with conflict in Karo District and to determine the effectiveness of the early warning team in handling conflict in Karo District as well as to determine and understand the effectiveness of the early warning team in handling conflict in Karo District. **Methods:** In writing this thesis the writer used a qualitative descriptive research method with data collection techniques namely observation, interviews, and documentation. In addition, the authors also analyzed the data with several steps used, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results:** The effectiveness of the Early Vigilance Team in dealing with conflict in Karo District has not been effective. There are still several obstacles, namely the lack of collaboration between agencies, and the lack of outreach to the community, and there are vacancies in certain sub-fields. **Conclusion:** The Effectiveness of the Early Vigilance Team's Task Implementation in dealing with conflict in Karo District has not been effective. This is due to the lack of coordination between agencies and the public who have not received socialization and limited budgets which are the inhibiting factors. The author also suggests that the National Unity and Political Agency of Karo Regency carry out outreach to the people in Karo Regency on a regular basis throughout the Karo Regency area and it is hoped that the Regional Government of Karo Regency should be better able to communicate and coordinate between agencies.

Keywords: Effectiveness, Conflict Handling, Kesbangpol

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kewaspadaan dini di tingkat lingkungan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Terwujudnya keamanan lingkungan akan menjamin keamanan wilayah dan daerah, bahkan nasional. Kewaspadaan dini harus dimulai dari lingkungan supaya dapat segera mendeteksi segala kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan. **Tujuan:** Mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo, mengetahui dan memahami faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Masih ditemui beberapa hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi, dan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran terbatas. **Kesimpulan:** Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi dan masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran yang terbatas yang menjadi faktor penghambat. Penulis juga menyarankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Karo secara rutin ke seluruh wilayah Kabupaten Karo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo diharapkan harus lebih mampu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi antar instansi.

Kata Kunci : Efektivitas, Penangan Konflik, Kesbangpol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kewaspadaan dini di tingkat lingkungan sangat penting dilakukan untuk mewujudkan keamanan lingkungan. Terwujudnya keamanan lingkungan akan menjamin keamanan wilayah dan daerah, bahkan nasional. Kewaspadaan dini harus dimulai dari lingkungan supaya dapat segera mendeteksi segala kemungkinan adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan. Dilansir dari lib.lemhannas.go.id menggambarkan bahwa kewaspadaan dini di Indonesia masih sangat lemah hal ini dibuktikan dengan anggapan yang ada di masyarakat. Masyarakat menuduh negara melakukan politik pembiaran dimana negara dianggap tidak pernah hadir dalam berbagai masalah yang ada di Indonesia. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sehingga pemerintah wajib menjaga ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Sebuah negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi warga negaranya. Konflik merupakan bentrokan yang terjadi antara dua pihak atau lebih diakibatkan oleh adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan yang memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam berbeda-beda. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik, seperti perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan latar belakang, bahkan perbedaan lainnya. Potensi terjadinya konflik lebih banyak

terjadi di daerah yang masyarakatnya heterogen. Perbedaan yang ada di setiap daerah tersebut memberikan dampak yang buruk apabila tidak dikelola dengan bijak, karena itulah dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan upaya yang tepat dalam mengurangi ancaman yang ada akibat perbedaan masyarakat. Penduduk yang menempati Kabupaten Karo memiliki beragam ras, bahasa, agama, pekerjaan, bahkan latar belakang Pendidikan yang beragam. Kabupaten Karo merupakan daerah yang memiliki potensi terjadinya konflik karena masyarakatnya yang heterogen.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Beberapa permasalahan secara umum yang saat ini dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Karo terkhusus pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

1. Terdapat berbagai penyebab terjadinya konflik di masyarakat yang mengakibatkan terjadinya beragam kasus terkait konflik di Kabupaten Karo.
2. Pemerintah belum mampu menangani konflik di Kabupaten Karo
3. Tim Kewaspadaan Dini masih belum efektif untuk menangani konflik di Kabupaten Karo
4. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya
5. Kurangnya pemahaman dan penguasaan SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
6. Kurangnya komitmen elemen pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kaidah perencanaan;
7. Belum adanya anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan inovasi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam konteks kewaspadaan dini pada penanganan konflik di daerah. Penelitian Fakhru Razi berjudul “*Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh*”, menemukan bahwa Eksistensi konflik di Aceh dianggap sebagai keadaan yang dapat menghambat pembangunan dan perubahan sosial. Penelitian Nanda Puspita Dewi berjudul “*Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah*”, menemukan bahwa Semakin banyak permasalahan sosial seperti kelompok-kelompok radikal yang tumbuh berkembang, dan masih marak aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Penelitian Dwi Agustina dan Edy Mulyadi menunjukkan bahwa Ibukota Jakarta memiliki peran ganda yang sangat menentukan arah kebijakan secara lokal/nasional dan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penelitian Lukman Hakim dan Eka Dewanti berjudul “*Partisipasi Masyarakat dalam FKDM di badan Kesbangpol untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta*” menemukan bahwa Jumlah penduduk yang banyak dan perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, pribadi, perilaku, pola pikir dan sebagainya dapat menimbulkan konflik. Penelitian Ahmad Hermansyah Sudirman berjudul “*Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ktentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Wajo*”, menemukan bahwa Maraknya potensi gangguan trantibum di Kabupaten Wajo sehingga membutuhkan peran serta partisipasi masyarakat dalam hal deteksi dini potensi gangguan trantibum. Penelitian Andri Marta dan Ulfa Umayasari berjudul “*Model Kebijakan Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Mengatasi Gejolak Sosial Masyarakat*” menemukan bahwa Kawasan Perbatasan adalah kendala dalam peningkatan infrastruktur dan berbagai pelayanan. Sehingga memicu terjadinya pungutan liar oknum dinas perhubungan dan kominfo Sumatera Selatan yang menciptakan gejolak pada masyarakat.

1.4. Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni terkait Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo melalui Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo dan mengetahui faktor penghambat efektivitas pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu penulis juga menganalisis data dengan beberapa langkah yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data merupakan suatu proses interpretasi data sehingga dapat ditafsirkan sehingga berguna dalam memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data termasuk bagian dalam proses penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah. Miles and Huberman (1988) dalam Berg (2001:35-36) menyatakan kegiatan pada analisa data kualitatif dilakukan secara dua arah dan terus menerus hingga selesai dan datanya sudah jenuh. Proses menganalisa data dilakukan setelah data yang diinginkan telah terkumpul, data-data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata bukan rangkaian kata. Penelitian memakai model analisis interaktif milik Miles dan Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2008: 247-252) melalui 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun dalam melakukan analisisnya penulis menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53) yang menyatakan bahwa efektivitas terdiri dari tiga dimensi yakni pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam Menangani Konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini akan menganalisis efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo dengan lokus penelitian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Peneliti ingin melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara menggunakan acuan teori Efektivitas oleh Richard M. Steers dengan tiga dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan dibentuknya Tim Kewaspadaan Dini adalah untuk dapat mengantisi segala potensi konflik yang ada di Kabupaten Karo dan juga mampu menyelesaikan konflik yang ada. Sehingga untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan tersebut peneliti mengukur dengan indikator yaitu sasaran, penyelesaian konflik dan dampak konflik. Berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara peneliti menetapkan indikator dalam pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan agar pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini dapat menangani konflik memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

Sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada Tanggal 11 Januari 2023 pada Pukul 10.00 WIB dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Bapak Tetap Ginting, S.Sos sebagai mengatakan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini di Kabupaten Karo merupakan upaya dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang dapat terjadi kapan pun juga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM, beliau mengatakan bahwa sasaran Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo memiliki peran penting bagi pemerintah kabupaten karo yang diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam mengantisipasi segala kemungkinan masalah yang muncul dalam masyarakat. wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 12.00 WIB bersama Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik bapak Drs. Jaluas Situmorang bahwa Tim Kewaspadaan dini memiliki peran untuk mendeteksi segala informasi yang diterima masyarakat, melihat dan mencari segala kemungkinan yang rawan dan dapat mengganggu keamanan di daerah. Tugas Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo adalah untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, serta menginformasikan kepada masyarakat. Diharapkan nantinya Tim Kewaspadaan Dini yang saat ini sudah terbentuk di Kabupaten Karo dapat menjadi bentuk antisipasi segala potensi terjadinya konflik. Berdasarkan hasil pengamatan peliti mengenai sasaran Tim Kewaspadaan Dini ialah untuk memudahkan dalam mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Selain itu Tim Kewaspadaan Dini juga diharapkan mampu mendeteksi segala potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang terjadi di Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo memiliki sasaran untuk dapat menciptakan stabilitas keamanan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo. Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo juga memiliki sasaran untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi segala konflik yang merupakan ancaman bagi masyarakat. Tim kewaspadaan dini Kabupaten Karo juga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, serta menginformasikan kepada masyarakat.

Jumlah Penyelesaian Konflik. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 11 Januari 2022 pada pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM, beliau mengatakan bahwa telah terjadi konflik yang berulang-ulang sepanjang tahun 2022 setidaknya terdapat 4 kasus di Kabupaten Karo yang telah terjadi selama 1 tahun. Terdapat berbagai jenis konflik yang telah terjadi di Kabupaten Karo seperti kasus terkait sengketa Lahan, Kasus Desa Gongsol, terdapat juga konflik Politik yakni konflik yang terjadi akibat hak suara pemilihan kepala desa. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian. Hasil wawancara peneliti pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dengan Kepala Satuan Intel Polisi Resort Tanah Karo Bapak AKP. Narno mengatakan bahwa terdapat 4 jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Karo seperti kasus pada tanggal 11 Agustus 2022 terjadi bentrok antara massa dari PTPN II dengan masyarakat desa Gongsol. Pada tanggal 9 Desember tahun 2021 yang masih menjadi konflik hingga tahun 2022 dimana massa yang mengatasnamakan persatuan pengungsi relokasi tahap III mengusir alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan Lahan Usaha Tani (LUT) yang menimbulkan perkelahian antara pihak aparat dengan masyarakat, kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 Massa yang merupakan masyarakat Desa Sukamaju bentrok dengan PT.BUK di Puncak 2000 Siosar yang mengakibatkan 5 orang luka, 1 bangunan dan 12 sepeda motor terbakar. Fakta bahwa telah banyak kasus yang telah diselesaikan juga sesuai dengan pernyataan yang peneliti dapatkan pada saat wawancara pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 15.00 WIB Kepala Desa Pertibi bapak Salomo Barus yang mengatakan bahwa konflik antara warga desa Pertibi dengan aparat telah selesai karena dilakukan mediasi pada saat itu. Dimana terdapat kesalahpahaman sehingga pihak aparat yang ternyata hanya melaksanakan tugasnya untuk melakukan pembersihan tanah

Lahan Usaha Tani mendapatkan amukan massa. Oleh karena itu, telah dilakukan aksi damai yang difasilitasi oleh Kesbangpol Karo untuk melakukan penyampaian suara masing-masing pihak hingga akhirnya diperoleh sebuah kesepakatan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan memang benar banyak kasus yang sudah terselesaikan. Apabila dipersentasekan lebih dari 50 persen jumlah kasus di kabupaten Karo telah mampu diselesaikan oleh Kabupaten Karo melalui Tim Kewaspadaan Dini yang dibentuk oleh badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten Karo.

Dampak Konflik. Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM menyatakan bahwa banyak masyarakat yang mengalami luka bahkan adanya aksi pembakaran yang tentu saja memberi kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa hingga saat ini konflik yang memberikan kerugian terbesar bagi pemerintah Kabupaten Karo sepanjang tahun 2022 adalah konflik yang terjadi antara masyarakat Sukamaju dengan PT.BUK yang mengakibatkan kerusakan lahan pertanian berkisar 1,3 Milyar. Beliau menyatakan bahwa Dinas Pertanian harus mengganti kerusakan yang dialami oleh masyarakat disekitar lokasi terjadinya konflik. Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Gelora Fajar, SH, MH Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum juga menyampaikan bahwa kerugian juga dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo sebagai aparat yang bertugas dalam mengamankan terjadinya konflik. Beliau menyampaikan bahwa konflik pada tanggal 9 Desember tahun 2021 antara massa dengan aparat yang bertugas membersihkan Lahan Usaha Tani (LUT) yang mengakibatkan anggotanya menjadi mengalami luka yang membutuhkan tindakan medis sebanyak 3 orang dengan biaya pengobatan berkisar RP 3.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti berkesimpulan bahwa setiap terjadi sebuah konflik pasti memiliki dampak masing-masing. Dampak ini biasanya tidak hanya dialami oleh masyarakat yang sedang berkonflik itu sendiri tetapi juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Karo dan masyarakat sekitar lokasi terjadinya konflik. Tim Kewaspadaan Dini memiliki peran yang besar untuk mengetahui terkait kerugian yang diakibatkan oleh sebuah konflik sehingga dapat menjadi bentuk antisipasi untuk terjadinya sebuah konflik. Tim Kewaspadaan Dini diharapkan lebih mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan mengetahui dampak konflik yang tidak hanya dialami oleh masyarakat tetapi juga pemerintah itu sendiri.

2. Integrasi

Integrasi adalah pembauran hingga mencapai satu kesatuan yang utuh dan dapat diartikan suatu proses dimana komponen yang berbeda bergabung menjadi satu. Integrasi pada penelitian ini diukur dari tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan sosialisasi dan kolaborasi antar instansi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 aspek untuk mengetahui integrasi Tim Kewaspadaan Dini untuk menangani konflik di Kabupaten Karo sebagai berikut:

Sosialisasi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan saat dilapangan terdapat undangan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 di Aula Rumah Makan MASPON. Melalui Surat Keputusan Bupati Karo Nomor: 300/242/Bakesbang/2022 dijelaskan bahwa Kesbangpol mengajukan surat untuk permintaan narasumber kepada Kapolres dan Dandim 0205 Tanah Karo dalam acara sosialisasi peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo melakukan sosialisai terkait kewaspadaan dini. Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dengan Kepala Satuan Intel bapak AKP Narno beliau juga mengatakan bahwa memang benar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo sudah melaksanakan sosialisasi tentang peningkatan Sumber Daya Manusia dan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 yang berlokasi di Aula Rumah Makan MASPON.

Kolaborasi Antar Instansi. Kolaborasi antar instansi merupakan hal yang harus dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini untuk terlaksananya tugas dari tim kewaspadaan dini. Pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIB peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Gelora Fajar,SH,MH Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menyampaikan bahwa kami tentu saja melakukan kolaborasi antar instansi yang bertujuan untuk terciptanya koordinasi dalam menangani konflik. Kami melakukan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA). Hasil wawancara dengan salah satu anggota Tim Kewaspadaan dini menyatakan bahwa anggota dari tim kewaspadaan dini di Kabupaten Karo terdiri dari banyak instansi yang tentu saja membentuk kolaborasi antar instansi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas, dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat dikatakan bahwa terdapat kolaborasi antar instansi, namun masih memiliki hambatan dalam penanganan konflik seperti terdapat perbedaan jadwal antar instansi sehingga tidak dapat terjadi kolaborasi dengan lengkap antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai wadah dalam terlaksananya kewaspadaan dini untuk menangani konflik di Kabupaten Karo dengan instansi lainnya sehingga dapat terbentuk kewaspadaan dini.

3. Adaptasi

Untuk mengukur kemampuan organisasi dalam beradaptasi peneliti melihat dari kesesuaian Standar Operasional Prosedur.

Kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Januari 2023 pukul 11.00 WIB dengan Kepala Subbidang Penanganan Konflik bapak Drs. Jaluas Situmorang menyatakan bahwa SOP merupakan hal yang penting untuk menjadi sebuah standar yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, SOP juga dapat bermanfaat untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas. Namun, saat ini kami hanya bekerja sesuai dengan dasar hukum yang ada. Beliau juga menyampaikan terkait Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ada sebagai berikut Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan konflik sebisa mungkin dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dalam menyelesaikan konflik. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Kesbangpol Karo yaitu :1) Menyusun perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan dini yaitu Menyusun rencana kerja sama intelijen, 2) Menyusun bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, 3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan dini dan Penanganan Konflik, 4) Melaksanakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Karo. Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti memang benar bahwa Badan Kesatuan Politik dan Bangsa melalui tim kewaspadaan dini telah memiliki Standar Operasional Prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan konflik di Kabupaten Karo.

3.2 Hambatan Dalam Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam Menangani Konflik di Kabupaten Karo

Kurangnya Koordinasi Antar Instansi. Proses pelaksanaan koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja serta pihak Kepolisian sebagai aparat masih memiliki hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa kesbangpol melakukan koordinasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dimuat dalam Grup Whatsaap. Setiap terjadi konflik akan ada laporan perkembangan di dalam grup tersebut, kemudian akan diadakan rapat untuk melakukan tindak lanjut untuk penyelesaian konflik yang ada di Kabupaten Karo namun, masih ada kendala dalam melakukan koordinasi seperti sulitnya berkomunikasi antara pimpinan dengan bawahan, selain itu banyak juga yang tidak berkenan hadir dalam rapat tersebut. Koordinasi yang dilakukan ternyata masih memiliki kendala seperti yang telah disampaikan oleh narasumber. Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Intel juga menyatakan bahwa masih ada kendala yang kami hadapi pada saat diadakan rapat rutin setiap bulannya untuk membahas mengenai perkembangan konflik yang ada di Kabupaten Karo sehingga dapat dilakukan koordinasi lebih lanjut. Masih sering dari berbagai instansi terkait yang tidak dapat hadir pada saat rapat koordinasi karena adanya perbedaan jadwal..

Masyarakat Belum Mendapatkan Sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat peneliti mengetahui bahwa masyarakat belum memahami tentang kewaspadaan dini. Berikut hasil wawancara dengan ibu Melvin Br Tarigan pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 16.00 WIB yaitu bahwa yang bersangkutan tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kewaspadaan dini. Kami belum pernah mendengar pemelintah menjelaskan terkait kewaspadaan dini jadi kami tidak mengetahuinya. Pernyataan ini membuktikan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Karo belum pernah mengedukasi masyarakat terkait kewaspadaan dini. Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 13.30 WIB dengan Ibu Suhmalem Silalahi beliau mengatakan bahwa selama ini mereka belum pernah mendengar tentang kewaspadaan dini apalagi tentang penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Memang kami mengetahui dari televisi ada terjadi bentrok di kabupaten karo yang selama ini sudah banyak terjadi.

Anggaran Terbatas Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam terlaksananya tugas tim kewaspadaan dini. Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 dijelaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini Daerah kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. Hasil wawancara bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Bapak Tetap Ginting,S.sos menyatakan bahwa pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini masih belum dapat terlaksana dengan baik karena kurangnya anggaran. Pelatihan dan sosialisasi juga tidak dapat dilakukan akibat kurangnya anggaran.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Untuk Mengefektifkan Kewaspadaan Dini Dalam Menangani Konflik di Kabupaten Karo

Melakukan Rapat Secara Rutin Untuk Menciptakan Koordinasi. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan Badan Kesbangpol Kabupaten Karo telah melakukan koordinasi yang melibatkan instansi lainnya. Untuk mengatasi hambatan yang menjadi peghambat kurang efektifnya tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa hal yang harus dilakukan adalah dengan membangun koordinasi yang bai kantar sesama anggota tim kewaspadaan dini sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan dengan baik.

Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait penanganan konflik maupun terkait kewaspadaan dini. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa memberikan sosialisasi kepada masyarakat adalah hal yang harus dilakukan untuk memberi pengertian kepada masyarakat terkait penanganan konflik. Sosialisasi ini harus dilakukan oleh tim kewaspadaan dini dan juga FKDM yang melibatkan masyarakat secara langsung. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yaitu Kepala Satuan Intel Polres Tanah Karo bapak AKP Narno yang peneliti wawancarai pada tanggal 17 Januari 2023 pukul 11.00 WIB mengatakan bahwa sosialisasi sangat penting dilakukan untuk dapat mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu diberikan pengertian terkait apa saja yang menjadi program dari pemerintah. Pernyataan beliau sejalan dengan hasil wawancara peneliti pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Gelora Fajar,SH,MH Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menyampaikan bahwa Tim kewaspadaan dini yang anggotanya terdiri dari seluruh perangkat daerah di kabupaten karo perlu melakukan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui keterlibatan mereka dalam program pemerintahan. Tim kewaspadaan dini juga tentu saja membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini. Sosialisasi juga penting dilakukan untuk menyadarkan masyarakat peran penting mereka dalam terciptanya kewaspadaan dini di Kabupaten Karo. Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi peneliti maka peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan terkait program yang dijalankan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat secara langsung terlibat dalam program-program pemerintah. Selain itu, pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini dapat terlaksana dengan baik.

Menyediakan Anggaran Khusus Untuk Tim Kewaspadaan Dini. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa Pemerintah perlu membuat anggaran khusus untuk pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini. Kemudian Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik ibu Litra Helvina Br Barus, SE, MM pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 09.00 WIB juga menambahkan bahwa anggaran khusus ini tentu saja akan mendukung dalam program-program yang dibuat oleh tim kewaspadaan dini seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tim kewaspadaan dini dengan memberikan pelatihan, selain itu dapat juga dilakukan sosialisasi terhadap instansi terkait maupun kepada masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Karo. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.00 WIB dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bapak Gelora Fajar,SH,MH Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum yang menyampaikan bahwa pemerintah memang sudah seharusnya memberikan anggaran kepada Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Faktor pendukung utama dari pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini adalah anggaran yang mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan terkait kurangnya anggaran tim kewaspadaan dini dalam pelaksanaan tugasnya adalah dengan membuat anggaran khusus tim kewaspadaan dini oleh pemerintah. Anggaran dapat menjadi faktor pendukung dalam terlaksananya tugas tim kewaspadaan dini di Kabupaten Karo. Hal ini diakibatkan karena dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kemampuan anggota tim kewaspadaan dini dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan sosialisasi kepada instansi lainnya dan masyarakat tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Karo.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan dini memberikan kontribusi yang besar untuk terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka terciptanya kewaspadaan dini dalam menangani Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Karo. Penulis menemukan temuan penting bahwa pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini akan terwujud dipengaruhi oleh berbagai pihak baik internal maupun internal. Pelaksanaan Tugas Tim kewaspadaan dini sangat dipengaruhi oleh masyarakat maupun pemerintah kabupaten Karo. Pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini masih memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya koordinasi antar instansi. Komunikasi yang baik untuk menciptakan koordinasi antar instansi pemerintah sangat penting dilakukan karena tim kewaspadaan dini tersiri dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Karo. Hambatan yang lain yakni masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi juga menjadi penentu terlaksananya tugas tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo. Masyarakat memegang peran penting sebagai objek dari tim kewaspadaan dini. Anggaran terbatas juga menjadi penghambat tim kewaspadaan dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh badan kesbangpol Kabupaten Karo yaitu melakukan rapat secara rutin untuk menciptakan koordinasi, memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara merata ke se seluruh wilayah kabupaten Karo untuk menyamakan pengetahuan masyarakat di Kabupaten Karo, dan menyediakan anggaran khusus untuk tim kewaspadaan dini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya maka peneliti dapat dapat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antar instansi dan masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi dan anggaran yang terbatas yang menjadi faktor penghambat.
- b. Faktor penghambat efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini dalam menangani konflik di Kabupaten Karo yaitu: 1) Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga mengakibatkan tim kewaspadaan dini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 2) Masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dari tim kewaspadaan dini sehingga pengetahuan masyarakat akan adanya tim kewaspadaan dini maupun penanganan konflik masih rendah. 3) Anggaran terbatas menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini.
- c. Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo adalah dengan melakukan rapat secara rutin antar instansi untuk menciptakan koordinasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan menyediakan anggaran khusus untuk tim kewaspadaan dini.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga penulis.

Arah Masa Depan (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tim Kewaspadaan Dini Dalam Menangani Konflik di Kabupaten Karo untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

Penulis juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo diharapkan dapat lebih aktif dalam pelaksanaan tugas tim kewaspadaan dini agar segala bentuk konflik dimasa mendatang dapat dicegah dan diatasi dengan baik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karo Bapak Tetap Ginting, S.Sos beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Creswell, John W. 2013. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed)* Edisi Revisi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Michael Huberman, dan Matthew B. Miles.1992. *Analisis data kualitatif* Terj. Tjejep Rohidi.Jakarta : UI Press

Steers, R.1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2019. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2008. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Michael Huberman, dan Matthew B. Miles.1992. *Analisis data kualitatif* Terj. Tjejep Rohidi.Jakarta : UI Press

Jurnal

Dwi Agustina dan Edy Mulyadi, 2020. “Analisis Strategis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Tahun 2019”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 3

Fakhrul Razi, Khairi, 2017. “Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol. 2

Lukman Hakim, Eka Dewanti, 2020. “Partisipasi Masyarakat dalam FKDM di badan Kesbangpol untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan”. *Public Administration Journal* Vol 4

Nanda Puspita Dewi, 2019. “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah”. Universitas Negeri Semarang

Sudharmono, 1994. “Kewaspadaan Nasional, Bahan Penataran Tarpadnas”. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah